

Analisis Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara

Dito Aditia Darma Nasution¹, Junawan²

Universitas Pembangunan Panca Budi ^{1,2}

ditoaditia@dosen.pancabudi.ac.id¹, junawan@dosen.pancabudi.ac.id²

Abstract

This study aims to determine the extent of the implementation of the regional financial accounting sistem at the Department of Manpower and Transmigration, North Sumatra Province. This research was conducted with a descriptive quantitative method that is using one variable and not to determine the relationship and influence of other variables. The sample of this study was 40 respondents, using the census method, ie all populations that met the criteria were studied. Data analysis was performed using a sample t-one test. From the results of the analysis, further conclusions are formulated. The results showed that the implementation of the regional financial accounting sistem at the Department of Manpower and Transmigration of North Sumatra Province. as one of the institutions of the North Sumatra Provincial Government is not optimal and still needs to be improved.

Keywords : Regional financial accounting, regional financial accounting sistems, public sector accounting

1. PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan tujuan reformasi di Indonesia, telah terjadi perubahan - perubahan yang mendasar, antara lain ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Perubahan - perubahan mendasar tersebut telah meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Untuk maksud tersebut Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai pembaharuan dan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah sebelumnya. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut berisi dan menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah segenap unturnya untuk segera menyusun dan menerapkan sistem akuntansi dalam mencatat dan melaporkan transaksi keuangannya. Sejalan dengan maksud tersebut, Menteri Dalam Negeri telah menyempurnakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007. Pemandagri tersebut memuat pedoman dalam implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dimana SAKD sudah menggunakan metode pencatatan *double entry* dengan sistem akuntansi berbasis kas yang selanjutnya dimodifikasi mengarah kepada basis akrual (*accrual basis*), sebagaimana dimaksudkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian implementasi SAKD diharapkan akan menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi (entitas) pemerintah daerah menjadi lebih akurat, tepat dan komprehensif, sehingga dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan tersebut (Sari & Putra, 2012).

Sejalan dengan hal tersebut, salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif. *Content* pelaporan, keakurasian angka-angka yang tertera di laporan keuangan dan dihasilkan melalui sistem akuntansi yang memadai dengan pengendalian yang baik Dengan demikian laporan keuangan menjadi transparan, relevan, reliabel dan tepat waktu sangat didambakan, yang sangat berguna. Untuk iitu perlunya implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang memadai (Fikri *et al*, 2015).

Dalam implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terdapat 2 sub sistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Laporan Keuangan OPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap OPD harus menyusun Laporan Keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi pemerintahan dengan sebaik mungkin (Nugraheni *et al*, 2008).

Sejalan dengan pengelola keuangan daerah salah satu OPD diantaranya adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara. OPD ini dalam pengelolaan dana APBD telah menggunakan sisten akuntansi keuangan daerah mulai dari dokumen, pencatatan dan menghasilkan laporan keuangan. Metode sistem akuntansi keuangan daerah yang digunakan selama ini adalah menggunakan sistem tata buku tunggal (*single entry*) dengan basis kas (*cash basis*) sebagai bahan pembuatan laporan keuangan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Namun implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah pada OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara ini belum memadai dan masih menggunakan metode lama yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Metode lama ini menggunakan sistem tata buku tunggal (*single entry*) dengan basis kas (*cash basis*) sehingga lebih tepat disebut pembukuan yang hanya bagian kecil dari akuntansi. Hasil wawancara peneliti dengan salah seorang pegawai keuangan OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara mengatakan bahwa implementasi sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara masih menggunakan *kas basis (cash basis)* dan sedang menuju *accrual basis*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan, mengatakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah Daerah.

Selanjutnya pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 menegaskan bahwa sitem akuntansi pemerintahan daerah memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan operasional;
- e. Laporan arus kas;
- f. Laporan perubahan ekuitas; dan
- g. Catatan atas laporan keuangan.

Menurut Susanto & Halim (2018) definisi akuntansi pemerintah daerah yang disebutkan sebagai akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan. Berbeda dengan Susanto & Halim (2018), menurut Salam & Sutaryo (2019) bahwa akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya Sriwijayanti (2018) menegaskan

Sistem akuntansi yang digunakan pada akuntansi pemerintah daerah adalah sistem desentralisasi.

Mardiasmo (2009) menyatakan tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, bahwa pada dasarnya siklus akuntansi keuangan daerah mengikuti siklus akuntansi. Yang dimaksud dengan siklus akuntansi adalah tahap-tahap yang ada dalam siklus akuntansi. Adapun tahapan-tahapan siklus akuntansi yaitu:

- a. Melaksanakan transaksi;
- b. Mencatat transaksi kedalam bukti transaksi;
- c. Menjurnal;
- d. Memposting;
- e. Membuat neraca percoabaan sebelum jurnal penutup;
- f. Membuat neraca lajur;
- g. Membuat neraca;
- h. Membuat laporan surplus dan defisit;
- i. Membuat jurnal penutup;
- j. Membuat neraca setelah jurnal penutup.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 232 Ayat (3) yang menjelaskan sistem akuntansi daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 233 ayat (1) sistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya meliputi: prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah, dan prosedur akuntansi selain kas.

Sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas pada APBD meliputi serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada OPD.

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada OPD meliputi serangkaian prosedur baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pencatatan, pengikhtisaran atas dasar pertanggungjawaban APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada OPD.

Prosedur akuntansi aset tetap pada OPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klarifikasi, dan penyusunan terhadap aset tetap yang dikuasai OPD. Setiap aset tetap kecuali tanah dan kontruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan massa manfaatnya. Metode penyusunan yang dapat digunakan adalah : metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode unit produksi.

Prosedur akuntansi selain kas pada OPD meliputi serangkaian proses baik manual maupun komputerisasi mulai dari pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan kejadian keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan selain kas pada OPD.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 234 ayat (3) menegaskan bahwa pada dasarnya transaksi ekonomi adalah aktifitas yang berhubungan dengan uang. Pengukuran transaksi ekonomi yaitu dengan menggunakan satuan uang, oleh karena itu semua transaksi akuntansi harus dinyatakan dalam satuan uang. Pencatatan transaksi ekonomi yaitu pengolaan data transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan atau pengurangan oleh

sumber daya yang ada. Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan merupakan hasil akhir proses akuntansi.

Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menetapkan beberapa macam pencatatan yang dapat digunakan, yaitu :

- a. **Single Entry**
Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.
- b. **Double Entry**
Sistem pencatatan Double entry juga sering disebut tata buku berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini ada sisi debit dan kredit. Sistem pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.
- c. **Triple Entry**
Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara pencatatan double entry dijalankan, Satuan Pemegang Kas pada satuan kerja maupun pada bagian keuangan pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran.

Setelah memahami sistem pencatatan, masih terdapat satu hal lagi yang penting dalam proses pencatatan, yaitu masalah pengakuan. Pengakuan adalah penentuan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk menentukan kapan transaksi dicatat, digunakan berbagai sistem/basis/dasar akuntansi, antara lain:

- a. **Basis Kas (*Cash Basis*)**
Basis kas merupakan basis akuntansi yang paling sederhana. Menurut basis ini, transaksi diakui/dicatat apabila menimbulkan perubahan atau berakibat pada kas, yaitu menaikkan atau menurunkan kas. Apabila suatu transaksi ekonomi tidak berpengaruh pada kas, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat.
- b. **Basis Akrua (*Akrual Basis*)**
Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas dan setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam pelaporan keuangan pada periode terjadinya.
- c. **Basis Kas Modifikasi (*Modified Akrual Basis*)**
Basis ini mencatat transaksi selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.
- d. **Basis Akrua Modifikasi (*Modified Akrual Basis*)**
Basis mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi pertimbangan kepraktisan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menetapkan elemen-elemen dan indikator sistem akuntansi keuangan daerah sebagai berikut :

- a. **Transaksi**
Transaksi merupakan bagian yang merubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya memerlukan data, dokumen, atau bukti pendukung dalam kegiatan operasi entitas. Transaksi dilakukan oleh masing-masing kas bendahara.
- b. **Jurnal**

Buku jurnal adalah media untuk mencatat transaksi secara kronologi (urut waktu) yang digunakan untuk mencatat, mengklarifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya.

c. Buku Besar

Buku besar merupakan suatu buku yang berisi kesimpulan rekening atau perkiraan yang telah dicatat didalam jurnal. Rekening-rekening tersebut digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban, hutang, dan ekuitas.

d. Neraca Saldo

Neraca saldo merupakan daftar rekening-rekening beserta saldo yang mempertanyai pada suatu periode tertentu.

e. Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode anggaran atau pada saat laporan keuangan disusun agar menghasilkan keterkaitan yang tepat antara pendapatan dan belanja/biaya. Penyesuaian dibutuhkan ketika transaksi-transaksi mempengaruhi pendapatan dan belanja/biaya lebih dari satu periode anggaran. Penyesuaian ini mengakui pendapatan dalam periode dimana pendapatan tersebut terhimpun, dan belanja/biaya dalam periode dimana barang dan jasa berkaitan digunakan. Sebuah penyusunan akan selalu melibatkan sebuah rekening atau sebuah rekening belanja/biaya dan sebuah rekening aktiva atau rekening hutang/kewajiban.

f. Laporan Keuangan

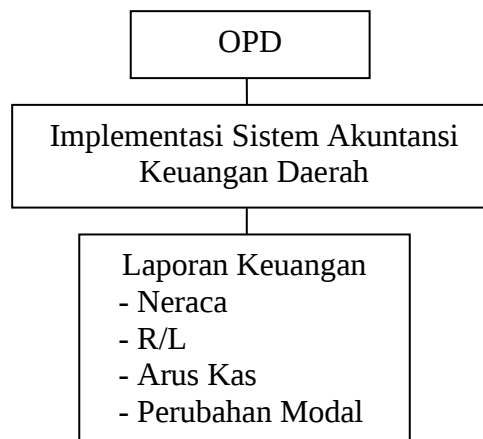
g. Jurnal Penutup

Jurnal penutup dilakukan setelah laporan keuangan disusun. Biasanya dilakukan pada akhir periode anggaran tahunan.

Berdasarkan elemen sistem akuntansi keuangan daerah tersebut, maka dapat disusun indikator sistem akuntansi keuangan daerah yaitu jumlah item pertanyaan adalah 8 item sebagai berikut :

- a. Kesesuaian sistem dengan SAP;
- b. Pengidentifikasian transaksi;
- c. Pencatatan transaksi;
- d. Bukti disetiap transaksi;
- e. Pencatatan kronologis;
- f. Pengklasifikasian transaksi;
- g. Laporan keuangan setiap periode;
- h. Pelaporan yang konsisten dan periode.

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, maka kerangka konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 1. Kerangka Konsep

Menurut Sugiyono (2016) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang mungkin benar dan mungkin salah sehingga dapat dianggap atau dipandang sebagai konklusi atau kesimpulan yang sifatnya sementara, sedangkan penolakan atau penerimaan suatu hipotesis tersebut tergantung dari hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang dikumpulkan, kemudian diambil suatu kesimpulan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menentukan hipotesis yaitu sebagai berikut:

- a. Implementasi sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara belum optimal sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

3. METODE PENELITIAN

Metode Penarikan Sampel

Menurut Ghazali (2016) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai identitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah, yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik, sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Populasi penelitian ini memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Pegawai yang mempunyai jabatan struktural dan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
- b. Pegawai/staf yang berkaitan pengelolaan sistem akuntansi keuangan daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara.
- c. Pegawai butir 1 dan 2 diatas, mempunyai pengalaman kerja di bidang akuntansi dan keuangan minimal 2 tahun.

Dari kriteria yang telah ditetapkan, jumlah pegawai yang memenuhi kriteria tersebut sebagai populasi berjumlah 40 orang responden, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Populasi Yang Memenuhi Kriteria

No	Unsur	Jumlah (orang/esponden)
1	Sekretaris/Mewakiki	1
2	Kepala Bidang /mewakili	8
3	Kepala UPTD/mewakili	3
3	Kepala Seksi	16
4	Staf Akuntansi	5
5	Staf Keuangan	7
Total Populasi yg memenuhi kriteria		40

Karena jumlah populasi relatif kecil, maka metode penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan metode sensus atau metode jenuh, yaitu semua elemen populasi yang berjumlah 40 elemen dijadikan sampel penelitian (Yusuf, 2014).

Metode Pengumpulan Data

Kuesioner adalah daftar pertanyaan dan pernyataan secara tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka misalnya menanyakan nama responden, tempat tinggal responden, usia responden, sedangkan pertanyaan tertutup, yaitu meminta responden untuk memilih salah satu jawaban yang disediakan dari setiap pertanyaan.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian adalah *skala likert*, dimana skala ini menghasilkan jawaban sangat tidak setuju sampai jawaban sangat setuju dalam rentang nilai 1 sampai 5.

Studi pustaka adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur dari berbagai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, diantaranya berasal dari buku, majalah, ataupun jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

Definisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel dimaksudkan untuk mengoperasionalkan dan atau operasional mendefiinisikan agar dapat diukur dengan cara tertentu. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Operasional Variabel

Variabel	Defenisi Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SAKD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013, pasal 1 butir 8)	1. Kesesuaian dengan SAP	1 – 5	Interval
		2. Pengidentifika sian transaksi	1 – 5	Interval
		3. Pencatatan transaksi	1 – 5	Interval
		4. Bukti transaksi	1 – 5	Interval
		5. Pencatatan kronologis	1 – 5	Interval
		6. Pengklasifikasian transaksi	1 – 5	Interval
		7. Laporan keuangan setiap periode	1 – 5	Interval
		8. Pelaporan konsisten	1 – 5	Interval

Metode Analisis Data

Menurut Conrad *et al* (2014) hipotesis deskriptif yang diuji dengan statistik parametrik merupakan dugaan terhadap nilai dalam satu sampel dibandingkan dengan standar. Selanjutnya Conrad *et al* (2014) mengatakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu variabel bila datanya berbentuk rasio atau interval maka digunakan t-test satu sampel. Berdasarkan pendapat yang disampaikan Conrad *et al* (2014) tersebut langkah-langkah pengujian hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Membuat tabulasi data sesuai dengan jawaban responden terhadap variabel penelitian yang digunakan. Tabulasi data ini dilakukan dengan menggunakan nilai rata-rata, untuk menggambarkan persepsi responden atas item-item pertanyaan yang diajukan.
- Menentukan apa yang diharapkan, yaitu menentukan jumlah skor ideal (yang diharapkan) yaitu responden memberikan jawaban dengan skor tertinggi.
- Menentukan uji t-test satu sampel untuk mengetahui sejauh mana hipotesis diketahui kebenarannya yaitu:
 - Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka menerima hipotesa nol (H_0) artinya hipotesis diterima yaitu implementasi sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara belum optimal dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
 - Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka hipotesa nol (H_0) ditolak, artinya hipotesis ditolak, yaitu implementasi sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara sudah optimal/sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas

Reliability Statistics					
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items			N of Items	
0.882	.882			8	

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
BUTIR 1	26.0750	7.917	.324	.287	.894
BUTIR 2	25.9250	6.122	.689	.622	.866
BUTIR 3	26.0000	7.128	.616	.564	.870
BUTIR 4	26.5500	6.664	.728	.912	.859
BUTIR 5	26.6250	6.599	.801	.853	.852
BUTIR 6	26.5750	6.661	.811	.944	.851
BUTIR 7	26.8500	6.592	.769	.718	.854
BUTIR 8	27.3250	7.251	.485	.390	.883

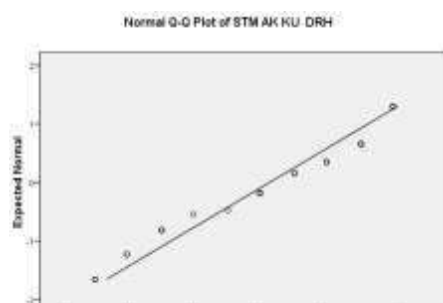
Summary Item Statistics							
	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3.784	2.950	4.350	1.400	1.475	.227	8

Dari tabel tersebut diatas dapat diinterpretasi uji reliabilitas dan validitas sebagai berikut :

1. Pada bagian reliabilitas statistik terlihat bahwa nilai *alpha cronbach's* hitung $0.8820 > 0.3120$ pada taraf kepercayaan 95% atau probabilitas signifikan 0.05 % atau Total *alpha cronbach's* diatas 50 %, artinya semua konsep pengukur masing-masing butir dari kuesioner adalah sangat reliabel yang berarti kuesioner yang digunakan adalah handal.
2. Pada *Item total statistic*, nilai *corrected item total correlation* (r) hitung > 0.3120 , maka dapat disimpulkan bahwa semua butir yang ada dalam kuesioner (butir 1 sampai dengan 8) dapat dinyatakan valid.

Uji Normalitas

Dalam penelitian ini hasil uji normalitas dapat dilihat secara jelas melalui grafik normal plot pada gambar berikut:



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas dengan Grafik Normal Plot

Dari hasil uji tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa grafik normal plot di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Artinya bahwa data variabel implementasi sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara terbukti berdistribusi normal.

Pengujian Hipotesis Deskriptif

Alat bantu yang dipakai adalah program SPSS (*Statistical Program for Social Science*). Hasil uji *t one sample* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji *t One Sampel*
One-Sample Test

	Test Value = 5				
	t	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper
SAKK DAERAH	- 20.713	39	.000	-1.21325	-1.3317 -1.0948

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
SAKK DAERAH	40	3.7867	.37045	.05857

Dari uji *one sampel test* dapat dilihat bahwa *t* hitung -20.713 yaitu *t* hitung (1.4650) lebih kecil dari *t* tabel (2.3451) ($-20.713 < 2.3451$). Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima. Artinya bahwa implementasi sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara belum optimal yaitu dilaksanakan 75,7 %, namun relatif baik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu lembaga pemerintah daerah belum optimal dan masih perlu ditingkatkan sebagaimana amanat PP nomor 71 Tahun 2010. Hasil uji *one sampel test* menunjukkan bahwa *t* hitung -20.713 yaitu *t* hitung (1.4650) lebih kecil dari *t* tabel (2.3451) ($-20.713 < 2.3451$). Artinya bahwa implementasi sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara belum optimal, (75,7 %), namun relatif baik.

Disarankan kepada penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian yang sejenis dengan memasukkan unsur variabel lainnya, karena dengan satu variabel penulis menganggap akan belum memberikan hasil yang sempurna baik bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik. Disarankan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara dapat mengimplementasikan sisten akuntansi keuangan daerah sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010 dan peraturan lainnya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Conrad, C., Serlin, R., & Harwell, M. (2014). Research Design in Qualitative Quantitative/Mixed Methods. In *The SAGE Handbook for Research in Education: Pursuing Ideas as the Keystone of Exemplary Inquiry*.
- Fikri, M., Inapty, B. ., & Martiningsih, R. S. . (2015). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD-SKPD di Pemprov. NTB). *Simposium Nasional Akuntansi XVII Medan*.
- Ghozali, I. (2016). Statistik Non-Parametrik: Teori dan Aplikasi dengan Program SPSS. In *Universitas Diponegoro*. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD002812>
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik. In *Penerbit Andi*. Yogyakarta.
- Nugraheni, Purwaniati, Subaweh, & Imam. (2008). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 13(1).
- Salam, A., & Sutaryo. (2019). Kesesuaian Sistem Pelaporan Keuangan Akrua dalam Pengambilan Keputusan Internal di Pemerintah Daerah. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 8(1), 21–34. <https://doi.org/10.25273/jap.v8i1.4087>
- Sari, D., & Putra, H. . (2012). Menelisik Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Manajemen (JEAM)*.
- Sriwijayanti, H. (2018). Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Pengelolaan APBD (Studi Persepsi Pengelola APBD SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang). *Jurnal EKOBISTEK*, 7(1), 89–101.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *cv Alfabeta*.
- Susanto, A. A., & Halim, A. (2018). Efek Ratchet pada Anggaran Pemerintah Daerah: Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi & Akuntabilitas Publik*, 1(1), 88–96.
- Yusuf, A. M. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan. In *KENCANA*. [https://doi.org/10.1016/S0257-8972\(02\)00060-9](https://doi.org/10.1016/S0257-8972(02)00060-9)